



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. Jend. Achmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21714, Faximile (0414) 21829
BentengSelayar

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan perangkat jabatan pada Sekretariat DPRD, dan untuk lebih tertib dan efektifnya pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

- Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 khususnya pada Lampiran II.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, HPS, dan rancangan kontrak;
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;

- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
- Mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan;
- Menetapkan Tim Pendukung;
- Menetapkan Tim atau Tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer); dan
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

b. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- Melaporkan pelaksanaan kegiatan; dan
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Mei 2025



SEKRETARIS DPRD
KAB. KEPULAUAN SELAYAR,
Drs. AHMAD YANI
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NID. 19670312 199203 1 004

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Selayar sebagai Laporan di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar sebagai Laporan di Benteng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Laporan di Benteng;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Inspektur Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
7. Kepala Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 8 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA
 TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

NO.	NAMA/NIP.	JABATAN	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	ANDI JALALUDDIN AMAR, S.H. NIP. 19710916 200604 1 022	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan	<p>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah <p>Peningkatan Kapasitas DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publikasi dan Dokumentasi Dewan - Penyediaan kelompok Pakar dan Tim Ahli - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat <p>Fasilitasi Tugas DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitasi Kunjungan Tamu
2	Hj. RISMALA DEWI, S.E. NIP. 19740529 201407 2 002	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	

	<p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan. - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya <p>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD - Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD <p>Layanan Administrasi DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD - Fasilitasi Fraksi DPRD - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD - Pendalaman Tugas DPRD
--	--

<p>3 SUHERTINA, S.T., M.M. NIP. 19790102 200701 2 015</p>	<p>Kasubag. Program dan Keuangan</p>	<p>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Pengelolaan dan Penyajian bahan Tanggapan Pemeriksaan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD <p>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber daya Alam - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK - Pengawasan Penggunaan Anggaran - Pembahasan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah <p>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan Kerja Dalam Daerah - Pelaksanaan Reses <p>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Kode Etik DPRD
<p>4 TOMMY ARSYAD, S.E. NIP. 197509292014071001</p>	<p>Pt. Kabag. Fasilitas Pengawasan dan Penganggaran</p>	

		<p>Pembahasan Kebijakan Penganggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan KUA dan PPAS - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - Pembahasan APBD - Pembahasan APBD Perubahan - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
--	--	--

SEKRETARIS DPRD,



Dis. AHMAD YANI

Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP. 19670312 199203 1 004